

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial



BATAK PARDEMBANAN: Social Construction and the Choice of Malay-Islamic Identity
Sakti Ritonga

**INTEGRATED COMMUNITY PARTNERSHIP IN PROMOTING TOURISM VILLAGES
IN PUJON KIDUL, INDONESIA**
Mahatva Yoga Adi Pradana, Asrul, Muhammad Mansur, Hanan Asrowy

**NAHDLATUL ULAMA AS THE MAIN ACTOR MANAGING AND RESETTING CIVILIZATION
IN THE DIGITAL ERA TOWARDS HUMAN HARMONY AND WORLD PEACE**
Ali Ridho, Widya Ningsih, Fitria Wahud, Idi Warsah,
Waryono Abdul Ghofur, Akhmad Rifa'i

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM, UIN SUNAN KALIJAGA**

JURNAL
SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2023



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA:
Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial
Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2023

Editor in Chief

Moh Soehadha

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Managing Editor

M Yaser Arafat

Univeristas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Peer-Reviewers

Amin Abdullah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Al Makin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Abdul Mustaqim

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Hasan Sazali

Univeristas Islam Negeri Sumatera Utara
Medan

Zuly Qodir

Univeristas Muhammadiyah Yogyakarta

Soni Akhmad Nulhaqim

Universitas Padjajaran, Jawa Barat

Anif Fatma Chawa

Universitas Brawijaya, Malang

Muhammad Najib Azca

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Jajang A Rohmana

Univeristas Islam Negeri Sunan Gunung Jati
Bandung

Editor

Nurus Sa'adah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Inayah Rohmaniyah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ustadi Hamzah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Ahmad Izudin

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,
Yogyakarta

Wawan Sobari

Universitas Brawijaya,
Malang

Pardamean Daulay

Universitas Terbuka, Surabaya

I Nyoman Ruja

Universitas Negeri Malang

Maulana S Kusumah

Universitas Jember, Jawa Timur

Erda Rindrasih

Utrecht University, Netherland

Fina Itriati

Universitas Gajah Mada, Yogyakarta



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Vol. 17, No. 2, Juli-Desember 2023

DAFTAR ISI

BATAK PARDEMBANAN: Social Construction and the Choice of Malay-Islamic Identity Sakti Ritonga.....	141
INTEGRATED COMMUNITY PARTNERSHIP IN PROMOTING TOURISM VILLAGES IN PUJON KIDUL, INDONESIA Mahatva Yoga Adi Pradana, Asrul, Muhammad Mansur, Hanan Asrowy.....	159
NAHDLATUL ULAMA AS THE MAIN ACTOR MANAGING AND RESETTING CIVILIZATION IN THE DIGITAL ERA TOWARDS HUMAN HARMONY AND WORLD PEACE Ali Ridho, Widya Ningsih, Fitria Wahud, Idi Warsah, Waryono Abdul Ghofur, Akhmad Rifa'i.....	177
MASALAH KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA KONTEMPORER Wasisto Raharjo Jati, Almunauwar Bin Rusli, Rukmina Gonibala.....	197
IDEALISM, PRAGMATISM, OPPORTUNISM: Explaining Islamist Movements in Contemporary Indonesia Ahmad Norma Permata.....	217
POLARISASI MASYARAKAT ARAB-HADHRAMI DI SURAKARTA, 1914-1950 Taslim Batubara, Muhammad Wildan.....	237
NEW MEDIA DAN REPRESENTASI BUDAYA ISLAM POPULER DI KALANGAN PENDAKWAH MUSLIM MILENIAL DI INDONESIA Zainuddin Syarif, Abd Hannan, Mubaidi Sulaeman.....	257
PENGISLAMISAN SEJARAH ISLAM DI NUSANTARA DALAM CERAMAH USTAZ SALIM A FILLAH Muh. Ulil Absor, Ahmad Anfasul Marom, M. Yaser Arafat, Raisatul Mufahamah.....	279

POLARISASI MASYARAKAT ARAB-HADHRAMI DI SURAKARTA, 1914-1950

Taslim Batubara

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
taslimbatubara98@gmail.com

Muhammad Wildan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
muhammad.wildan@uin-suka.ac.id (2)



Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis fenomena polarisasi yang terjadi pada masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta pada periode 1914-1950 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Artikel ini mengkaji polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta dengan pendekatan sosiologis. Konsep-konsep yang digunakan di dalam artikel ini ialah: polarisasi, konflik, dan integrasi sosial. Dalam artikel ini peneliti menggunakan teori Polarisasi Sosial untuk melihat perbedaan yang tajam antara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat, sehingga kelompok-kelompok tersebut saling terisolasi dan mengalami konflik. Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan empat tahapan, yaitu: pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu: sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: faktor terjadinya polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta, 1914-1950 terjadi karena tiga hal, yaitu: Fatwa Solo, perbedaan pandangan tentang gelar dan tradisi, dan orientasi terhadap tanah air. Sementara bentuk-bentuk polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta antara tahun 1914-1950 terbentuk melalui tiga hal, yaitu: organisasi sosial, pendidikan, dan surat kabar. Hasil lainnya terkait dampak yang terjadi terkait dengan dampak polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta, 1914-1950 terwujud ke dalam dua hal, yaitu: mencari organisasi persatuan masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta dan pengintegrasian masyarakat Arab-Hadrami Surakarta menjadi Indonesia.

Kata kunci: Polarisasi, Arab-Hadrami, integrasi, Surakarta

Abstract

This article aims to analyze the phenomenon of polarization that is occurred among the Arab-Hadrami community in Surakarta during the period 1914-1950 and the influencing factors. The research examines the polarization of the Arab-Hadrami community in Surakarta using a sociological approach. The concepts utilized in this study are polarization, conflict, and social integration. The researchers employs the Social Polarization theory to observe sharp differences between social groups within the society, leading to their isolation and conflicts. The research follows a historical research method with four stages: source collection, criticism, interpretation, and historiography. Two types of data sources are utilized: primary and secondary sources. The findings reveal that the polarization among the Arab-Hadrami community in Surakarta from 1914 to 1950 occurred due to three factors: the Fatwa Solo, the differences in perspectives on titles and traditions, and orientation toward the homeland. The forms of polarization within the Arab-Hadrami community in Surakarta between 1914-1950 emerged through social organizations, education, and newspapers. Other results related to the impact of polarization among the Arab-Hadrami community in Surakarta from 1914-1950 manifest in two aspects: the search for unity organizations among the Arab-Hadrami community in Surakarta and the integration of the Arab-Hadrami community in Surakarta into Indonesia.

Keyword: polarization, arab-hadrami, integration, Surakarta



PENDAHULUAN

Pada awal abad ke-20 M, isu yang mulai populer di Hindia-Belanda yaitu pembaruan Islam dan nasionalisme. Isu ini diikuti oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat Arab-Hadrami. Era ini merupakan awal dari gerakan pembaruan Islam di Indonesia dengan tujuan mengembalikan kemuliaan agama dan memajukan umat (Noer 1990). Komunitas Arab-Hadrami mengenal periode ini dengan sebutan "*Nahdah Al Hadramiyah*" (kebangkitan kaum Hadrami) (Al-Bashir 1915), sehingga mereka memasuki fase baru dengan tidak ketinggalan dalam mengambil berbagai tindakan.

Dua isu utama yaitu pembaruan Islam dan nasionalisme menjadi penyebab langsung perpecahan di dalam masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda. Kekisruhan semakin diperparah dengan berdirinya beberapa organisasi para *muwallad* sebagai respons semakin meningkatnya integrasi masyarakat Arab-Hadrami dengan Hindia-Belanda pada masa itu (Jonge 2019). *Mura'atul al-Ikhwan* (Penghormatan terhadap Persaudaraan) adalah organisasi pertama yang dibentuk oleh Arab-Hadrami. Organisasi tersebut berdiri sekitar tahun 1913 di Surabaya yang bertujuan mengembangkan kerja sama di antara orang-orang Arab-Hadrami yang lahir di Hindia Belanda. Kemudian ada juga *Jam'iyyah al-Tahdibiyyah* (Organisasi Pendidikan) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1924 (Haikal 2019).

Pasca terjadinya polarisasi, masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda terbagi dalam dua kelompok utama, yaitu kelompok sayid dan kelompok non-sayid. Mereka kemudian mendirikan organisasi masing-masing, yaitu Ar Rabitah Alawiyah (didirikan pada tahun 1928 oleh kelompok sayid) dan Al Irsyad (didirikan pada tahun 1914 oleh kelompok non-sayid). Sebelum kedua organisasi

tersebut muncul, masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda memiliki satu perkumpulan bersama yang bernama *Jamiat Khair* yang berdiri pada tahun 1901 di Batavia (Jonge 2007).

Komunitas Arab-Hadrami yang ada di Hindia-Belanda mengalami polarisasi secara menyeluruh, tidak terkecuali masyarakat Arab-Hadrami yang ada di Surakarta. Di wilayah ini, polarisasi terjadi karena dipengaruhi oleh Ahmad Soerkati yang membawa isu persamaan derajat. Ketika ia menuju ke Surakarta, terjadi penolakan oleh kelompok non-sayid terhadap tradisi mencium tangan (*taqbil*) dan penggunaan gelar sayid. Selain itu, polarisasi di wilayah ini disebabkan juga karena masalah pendidikan dan politik. Dalam bidang pendidikan, golongan sayid mendirikan lembaga bernama Sekolah Islam Diponegoro Surakarta pada 7 Oktober 1928 (Bazher 2020).

Masyarakat Arab-Hadrami yang menetap di Surakarta terkonsentrasi di satu wilayah yang berdekatan dalam satu kampung atau lebih dikenal dengan Pasar Kliwon. Permukiman Arab-Hadrami terletak di Pasar Kliwon, di dekat Keraton Kasunanan Surakarta, dan mencakup tiga kelurahan, yaitu Pasar Kliwon, Semanggi, dan Kedung Lumbu. Wilayah ini terletak di sisi timur dinding Baluwarti Keraton Kasunanan Surakarta dan menjadi rumah bagi orang-orang Arab-Hadrami. Kedatangan masyarakat Arab-Hadrami ke Pasar Kliwon diyakini pada abad ke-19 M (Hidayatullah 2021). Pada Tahun 1899, pemerintah Hindia-Belanda memberlakukan kebijakan yaitu hanya memperbolehkan kelompok Timur Asing untuk tinggal di kampung tertentu dan tidak diizinkan tinggal di permukiman orang Eropa atau kampung pribumi. Oleh karena itu, banyak orang Arab-Hadrami di Surakarta membangun rumah mereka dengan tembok tinggi dan pagar sekelilingnya (Wibowo 2020).

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mengkaji tentang polarisasi pada masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta tahun 1914-1950, dengan menganalisis lebih lanjut mengenai polarisasi yang terjadi pada masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta. Terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang sosial-keagamaan Arab-Hadrami, di antaranya: Dewi (2016), mengkaji tentang peran Habib Anis bin Alwi al Habsyi dalam upaya menyebarkan agama Islam di Surakarta pada saat pembaharuan Islam sedang marak. Penelitian Wibowo (2007) bertujuan untuk mempelajari peran orang Arab dalam jaringan perdagangan Batik di Surakarta pada abad ke-20 M. Penelitian Hidayatullah (2021) fokus pada pembahasan terkait keterlibatan orang Arab di Solo pada gerakan modernisme. Penelitian Sodikin (2021) menunjukkan betapa pentingnya kontribusi dari komunitas Arab dalam gerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang terdiri dari dua fase yaitu sebelum dan setelah kemerdekaan. Penelitian yang ditulis oleh Miftahuddin (2017) fokus pada gejolak, konflik, dan perpecahan yang terjadi di dalam komunitas Hadrami yang tergabung dalam gerakan Al Irsyad.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, bahwa dikursus mengenai masyarakat Arab-Hadrami di Indonesia sudah banyak dibahas, namun belum terdapat pembahasan secara rinci mengenai polarisasi yang terjadi pada masyarakat Arab-Hadrami, khususnya di Surakarta. Oleh karena itu, artikel ini hadir bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Artikel ini difokuskan pada bagaimana bentuk polarisasi pada masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta, terutama dari tahun 1914-1950, hingga melihat dampak dari polarisasi tersebut yang nantinya masyarakat Arab-Hadrami melakukan integrasi menjadi bagian dari Indonesia.

METODOLOGI

Artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah di mana terdapat lima tahap dalam penelitian sejarah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman 2019). Tahapan awal dalam metodologi sejarah adalah proses pengumpulan sumber atau heuristik. Sumber primer yang digunakan meliputi Volkstelling 1930 Deel VII, Chineezen En Andere Vreemde Oosterlingen in Nederlandsch-Indie, Koempoelan Toelisan dengan Gerakan al-Irsjad, Verslag Tahoenan 1935-1936 Al Irsyad, Sikep dan Toedjoean Al-Irsjad, serta surat kabar sezaman seperti: *Pewarta Arab*, *Hadramaut*, *Matahari*, *Al-Ma'arif*, *ad-Dahna*, *Al-Bashir*, *Insaf*, *Al-Wiwac*, *Pembela Islam*, *Lembaga Baroe*, dan *Aliran Baroe*. Sedangkan sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Langkah kedua dalam metodologi sejarah adalah melakukan kritik sumber setelah proses pengumpulan sumber, peneliti akan mengevaluasi sumber-sumber yang telah dikumpulkan sesuai dengan periode waktu yang dibahas dalam artikel ini, serta seberapa relevan sumber-sumber tersebut dengan tema penelitian mengenai polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta. Langkah berikutnya adalah interpretasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis dan penyusunan sumber-sumber tersebut yang sesuai dengan periode sejarah yang sedang diteliti. Langkah terakhir dari metodologi sejarah adalah historiografi, yaitu penulisan hasil penelitian.

Artikel ini mengulas tentang sejarah sosial polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis di sini merujuk pada cara menggambarkan peristiwa masa lalu dengan memperhatikan aspek sosial yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Konstruksi sejarah dengan pendekatan sosiologis bisa dikategorikan sebagai sejarah sosial karena mencakup analisis mengenai golongan sosial, hubungan sosial, konflik kepentingan, pelapisan sosial, status sosial, dan sejenisnya.

PENJELASAN OBJEK KAJIAN

Untuk memfokuskan dan mengarahkan penelitian, peneliti menetapkan dua batasan dalam artikel ini, yaitu batasan temporal dan batasan spasial. Batasan temporal ditetapkan pada periode antara tahun 1914 hingga tahun 1950. Tahun 1914 dipilih sebagai batas awal karena pada masa itu organisasi Al-Irsyad didirikan di Surakarta, yang menandai dimulainya polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta. Sedangkan tahun 1950 dipilih sebagai batas akhir karena pada masa itu, gejolak perpecahan dan polarisasi dalam masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta mulai mereda karena isu pembaruan dan nasionalisme. Pada tahun ini, sebagian besar masyarakat Arab-Hadrami juga bersedia mengintegrasikan diri ke dalam bangsa Indonesia yang sudah merdeka secara berdaulat. Batasan spasial peneliti tetapkan di Surakarta dengan alasan karena wilayah ini memiliki basis masyarakat Arab-Hadrami yang cukup besar, serta menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi dari dua kelompok besar masyarakat Arab-Hadrami yang terpolarisasi, yaitu kalangan sayid dan non-sayid.

PEMBAHASAN

Sejarah Kedatangan Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta

Kedatangan dan perkembangan masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta tidak memiliki catatan tahun pasti, namun diduga telah hadir sejak sebelum abad ke-20 M. Mereka datang sebagai pedagang yang menyebarkan Islam, dan kemungkinan besar tiba di Surakarta setelah berdagang di pelabuhan di pantai utara Jawa dan melewati Sungai Bengawan Solo. Bandar Semanggi, sebuah permukiman asing di sepanjang sungai tersebut, diyakini menjadi tempat persinggahan dan perkampungan awal orang Arab-Hadrami di Surakarta (Berg 2010). Kemudian, dengan semakin majunya infrastruktur transportasi di pergantian abad ke-20, akses imigran Arab-Hadrami ke Surakarta semakin mudah melalui jalur darat. Orang Arab-Hadrami di Surakarta ditempatkan di wilayah Pasar Kliwon atau *Sarkli*, yang merupakan kecamatan di Surakarta. Wilayah ini dikenal sebagai tempat perdagangan kambing yang selalu ramai, terutama pada hari pasaran Kliwon. Seiring waktu, wilayah tersebut kemudian dikenal dengan nama Pasar Kliwon dan terus menjadi pusat perdagangan yang penting di Surakarta (Jacobsen 2009).

Pada akhir abad ke-19 M, masyarakat Arab-Hadrami datang ke Surakarta dan membentuk kampung Arab di daerah Pasar Kliwon. Kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang memecah masyarakat menjadi beberapa golongan etnis, seperti golongan Eropa, Timur Asing yang meliputi Arab-Hadrami dan keturunannya, serta golongan pribumi, merupakan bagian dari pengelompokan tersebut. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mencegah pengaruh Islam yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Hindia-Belanda berupaya untuk memisahkan masyarakat Arab-Hadrami dari pergaulan dengan masyarakat pribumi pada saat itu (Mandal 2017).

Dalam pembentukan kampung-kampung Arab oleh pemerintah Hindia-Belanda, selain menempatkan masyarakat Arab-Hadrami ke dalam kampung-kampung yang terpisah, pemerintah juga menunjuk seorang pemimpin golongan yang disebut Kapitan atau Letnan Arab, dengan jumlah yang sesuai dengan populasi komunitas yang ada. Di Surakarta, beberapa Letnan memimpin golongan Arab-Hadrami dalam pembentukan kampung tersebut, dan pemerintah menunjuk seorang pemimpin golongan yang disebut Kapitan atau Letnan Arab, jumlahnya disesuaikan dengan populasi komunitas yang ada (Hayaze 2021). Beberapa Letnan yang memimpin Golongan Arab-Hadrami di Surakarta antara lain Sayyid Muhammad bin Mina pada tanggal 15 Agustus 1873, Syaikh Awad bin Sungkar Al-Urmei dari tahun 1900 hingga 1923, dan Syaikh Awad bin Abdullah Syahbal dari tanggal 25 Juli 1923 hingga 1942 (Dewi 2016).

Surakarta memiliki jumlah penduduk keturunan Arab-Hadrami yang cukup besar di pulau Jawa, yaitu di kota-kota seperti Jakarta, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya. Menurut catatan Berg, pada tahun 1870 terdapat 42 orang Arab di Surakarta, dan pada tahun 1885 jumlah tersebut meningkat menjadi 71 orang yang terdiri dari dua golongan yaitu Wulaiti dan Muwallad. Sejak tahun 1873, dipilih seorang Kepala Golongan Arab (*Hoofd der Arabieren*) untuk memimpin golongan Arab-Hadrami di Surakarta (Berg 2010).

Untuk menjadi kepala golongan Arab di Surakarta pada masa itu, seorang Arab-Hadrami harus memenuhi beberapa syarat. Syarat pertama adalah berasal dari golongan Wulaiti atau Arab Totok yang lahir di Hadramaut. Hal ini dianggap penting karena dapat menunjukkan rasa penghormatan dan penghargaan kepada komunitas Arab-Hadrami di wilayah yang dipimpinnya dan juga dapat meningkatkan rasa dihormati dalam masyarakat (Miftahuddin 2017). Selain itu, mereka juga harus menguasai bahasa Arab agar dapat berkomunikasi dengan faktor pemahaman agama lebih dalam, serta memiliki kemampuan ekonomi yang dicari ialah mereka yang secara ekonomi sangat mampu atau paling mampu di saat itu. Syekh Awad Syahbal memenuhi seluruh kriteria syarat tersebut sehingga ia diangkat menjadi Kapitan Arab terakhir di Surakarta (Bazher 2020).

Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta memiliki kehidupan sosial-keagamaan yang tidak jauh berbeda dengan komunitas yang ada di wilayah lainnya. Salah satu aspek sosial dan budaya yang paling menonjol adalah adanya istilah-istilah yang digunakan untuk membedakan golongan di dalam komunitas Arab-Hadrami itu sendiri. Beberapa istilah yang perlu dipahami antara lain sayid, non sayid (seperti syekh), *wulaiti* (totok), dan *muwallad* (peranakan). Menurut Hidayatullah, istilah-istilah tersebut menjadi ciri khas masyarakat Arab-Hadrami di berbagai daerah (Fatiyah 2016).

Begitu juga dengan kondisi sosial budaya orang-orang Arab di perkampungan Arab Pasar Kliwon. Orang-orang Arab-Hadrami di Surakarta juga masih menggambarkan kebudayaan kental dari tanah leluhurnya. Hal ini terlihat dari suasana Hari Raya Idul Fitri di Pasar Kliwon yang dimuat di dalam surat kabar *Aliran Baroe* sebagai berikut:

“Hari raja Aidul-Fitri di kota Solo Pasar Kliwon, sama artinja dengan hari raja di Hadramaut. Bahkan pada hari itoe, tanah kasoenanang jang memakai nama “Pasar Kliwon” itoe, seakan akan ia tida meroepakan Indonesia lagi, tapi sematamata sebagai soekoe dari tanah Hadramaut (*Aliran Baroe* 1939b).”

Masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda mayoritas bermata pencaharian sebagai pedagang, yaitu 72,7%, dan sekitar 10,6% lainnya bekerja di sektor industri. Kondisi ini juga terjadi di Surakarta, yang merupakan kota perdagangan, di mana sebagian besar masyarakat Arab-Hadrami bekerja sebagai pedagang. Golongan yang dominan dalam masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta adalah “wong dagang” yang terdiri dari syaikh dan qobail (Bazher 2020).

Komunitas Arab-Hadrami di Surakarta memiliki tempat khusus tinggal di Pasar Kliwon, yang membedakannya dari pemukiman lain di kota tersebut, sehingga mereka tetap terlihat sebagai orang-orang asing dan memiliki identitas sebagai “orang Arab”. Pada awal abad ke-20 M, para pedagang Arab-Hadrami yang tinggal di Pasar Kliwon cenderung menjual barang dagangan yang memperkuat identitas mereka sebagai orang Arab-Hadrami (Kesheh 2007).

Pedagang Arab-Hadrami di Pasar Kliwon menjual berbagai macam barang dagangan yang menguatkan identitas mereka sebagai orang Arab-Hadrami. Barang-barang dagangan tersebut antara lain barang pengobatan seperti madu, jahe, minyak samin, jintan hitam (*habatus sauda*), minyak zaitun, perlengkapan ibadah seperti sejadah, sarung, gamis, buku agama, serta bahan-bahan pangan khas Timur Tengah seperti kurma dan kacang Arab. Selain itu, mereka juga memiliki toko-toko monogram atau aksesoris di daerah Singosaren yang pada saat itu merupakan salah satu pasar modern

di Surakarta. Kondisi mayoritas pedagang Arab-Hadrami di Pasar Kliwon saat ini masih melanjutkan perdagangan tersebut (Fatiyah 2016).

Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta tidak hanya terlibat dalam perdagangan kuliner dan perlengkapan ibadah, namun juga berperan penting dalam perkembangan industri batik di kota ini. Dalam praktik perdagangan, mereka berfungsi sebagai kelas perantara antara kelas pertama (Eropa) dan kelas ketiga (pribumi). Keterlibatan mereka sebagai “tangan kedua” ini menunjukkan peran yang cukup besar dalam ekonomi Surakarta.

Masyarakat Arab-Hadrami memiliki peran penting dalam perdagangan kain batik di Surakarta. Salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan kain batik adalah Pasar Kliwon, bersama dengan daerah Laweyan, Pasar Gedhe, dan Loji Wetan. Masyarakat Arab-Hadrami tertarik pada kain batik bukan karena motifnya, melainkan karena keuntungan ekonomisnya. Mereka terkenal ulet dan pandai berdagang sehingga banyak industri batik yang berkembang di wilayah ini, dimiliki oleh orang-orang Arab-Hadrami (Wibowo 2007).

Faktor Terjadinya Polarisasi Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta

Fatwa Solo: Kafa'ah dan Status Pernikahan yang diperdebatkan

Sistem patrilineal merupakan ciri masyarakat Arab-Hadrami di mana hubungan kekerabatan ditentukan oleh garis keturunan ayah. Dalam sistem ini, perkawinan dapat memasukkan seorang istri ke dalam masyarakat suaminya dan anak-anak mereka akan menjadi anggota masyarakat ayah mereka. Namun, sistem ini juga dapat menimbulkan perselisihan antara golongan sayid dan non-sayid dalam hal *kafa'ah* atau kesesuaian dalam pernikahan (Muzakki and Hafshawati 2021).

Dalam hal ini, terdapat perselisihan antara golongan sayid dan non sayid dalam masalah *kafa'ah* (kesesuaian atau kecocokan) dalam pernikahan. Golongan sayid berpendapat bahwa seorang syarifah hanya bisa dinikahi oleh seorang sayid, yaitu seorang yang sekufu' (sederajat) dengannya. Hal ini dikarenakan pertalian darah yang dianut dari garis keturunan ayah yang akan hilang jika menikah dengan golongan non sayid. Sementara itu, golongan non sayid beranggapan bahwa manusia itu sederajat sesamanya jika telah memeluk Islam dan kini sederajat dengan golongan sayid (Miftahuddin 2017).

Pernyataan Ahmad Soerkati tentang pernikahan menjadi salah satu sebab utama terjadinya polarisasi di kalangan masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda dan Surakarta. Sejak awal kedatangannya, Soerkati tidak menyukai pandangan keagamaan tradisional dan hubungan sosial yang kaku dalam komunitas tersebut, terutama perilaku angkuh para sayid di Jawa. Soerkati yang terpengaruh pandangan Pan-Islamisme Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha sangat menentang pandangan keagamaan seperti itu. Pandangannya yang keras menjadi perbincangan panas di kalangan Arab-Hadrami di Hindia-Belanda (Batarfie 2021).

Kekisruhan terjadi ketika Ahmad Soerkati melakukan perjalanan keliling Jawa Tengah sebagai tamu golongan sayid pada sekitar tahun 1913 dan kemudian singgah di Surakarta. Saat itu, Sa'd bin Sungkar sebagai salah satu hadirin menanyakan pendapatnya mengenai hukum perkawinan

antara syarifah dengan pria non sayid. Dengan tegas, Soerkati menjawab bahwa pernikahan antara anak perempuan seorang sayid (syarifah) dengan laki-laki non sayid diperbolehkan dan sudah sesuai dengan *kafa'ah*. Jawaban Soerkati tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “Fatwa Solo” dan menjadi penyebab kekisruhan di kalangan masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda dan Surakarta (Anshari and Fahrudin 2020).

Fatwa yang dikeluarkan oleh Ahmad Soerkati tidak dapat disangkal dipengaruhi oleh semangat persamaan derajat yang berkembang di Hindia-Belanda pada abad ke-20. Pada saat itu, beberapa kelompok masyarakat merasa lebih unggul sebagai keturunan terhormat dan merendahkan mereka yang bukan dari golongan mereka. Mereka mempertahankan hak-hak istimewa ini secara turun-temurun selama berabad-abad, termasuk aturan *kafa'ah* yang mengatur pernikahan dan melarang laki-laki menikahi perempuan yang bukan dari golongannya (Arifianto 2011).

Sayid Umar Atlas mengeluarkan sebuah fatwa sebagai tanggapan atas pernikahan seorang syarifah dengan seorang pria Muslim non-Sayid yang disetujui oleh orang tuanya. Fatwa tersebut menyatakan bahwa pernikahan semacam itu adalah haram, atau dilarang oleh hukum Islam. Sayid Umar Atlas sendiri adalah seorang Sayid, anggota kelas sosial yang dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan fatwanya mencerminkan pandangan tradisional bahwa pernikahan antara seorang syarifah dan pria non-Sayid dilarang. Fatwa ini menyebabkan golongan sayid marah dan menyebarkan secara luas. Menurut Sayid Umar Atlas, pernikahan semacam itu menghancurkan hukum *kafa'ah*, kriteria utamanya adalah keturunan yang memiliki kriteria tertentu (Kazim 2022).

Surat kabar Aliran Baroe merespons kekisruhan tentang fatwa Sayid Umar Atlas terkait pernikahan antara syarifah dengan laki-laki non sayid dengan menuliskan kesulitan perempuan Arab-Hadrami untuk menikah dengan laki-laki non Arab. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan non sayid sangat getol dengan penolakan status *kafa'ah* ini. Isi tulisan tersebut menyuarakan keberatan mereka atas ketentuan *kafa'ah* yang sebelumnya dinikmati oleh kalangan sayid, dan menyebutkan bahwa perempuan dari masyarakat Arab-Hadrami juga mengalami diskriminasi dalam hal pernikahan. Berikut isi tulisan yang dimuat di surat kabar tersebut:

“Gadis-gadis (Arab) itoe tida bisa bersoeamikan lain bangsa, lantaran sikap pergaoelannja tidak mengidzinkan. Tida bisa njatakan kandoengan batinja, lantaran sikap masjaratnja melarang mereka berbitjara..... Tida bisa mengeloeuhkan halja kepada orang, lantaran maloe dari satoe djoeroesan poen djoroessannya jang lain lagi mereka tida di'idzinkan bertemoe moeka atau berbitjara pada sesamanja fihak isteri (Bafagieh 1938).

Ketegangan antara golongan sayid dan non sayid di Surakarta juga meliputi masalah gelar sayid dan tradisi *taqbil*. Penolakan terhadap *taqbil* adalah bagian dari penolakan sistem stratifikasi sosial orang Arab-Hadrami, khususnya terhadap status tradisional sayid. Pada awal dekade 1900-an, ketegangan mulai terasa di kalangan non sayid yang kaya karena kebiasaan memuja sayid yang semakin menyakitkan hati. Pada tahun 1913, Ahmad Soerkati dari kalangan non sayid menggunakan pengaruhnya untuk mengeluarkan fatwa yang melawan kebiasaan di Hadramaut. Hal ini menunjukkan adanya konflik yang muncul akibat perbedaan pandangan tentang sistem sosial dalam masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta (Freitag 2003).

Perbedaan Pandangan Tentang Gelar dan Tradisi

Polarisasi di kalangan Arab-Hadrami yang muncul akibat perselisihan mengenai gelar sayid dan *taqbil* tak bisa dihindari lagi pada titik ini. Perselisihan ini turut menimbulkan perpecahan di antara golongan sayid dan non sayid pada generasi berikutnya. Perdebatan tersebut menciptakan kemarahan di antara masyarakat Arab-Hadrami selama dua dekade dan memperdebatkan tiga kebiasaan masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda, yaitu: *taqbil*, larangan pernikahan antara syarifah dan non sayid, dan penggunaan nama sayid yang kontroversial sejak tahun 1930-an (Haikal 2019).

Peristiwa penolakan untuk mencium tangan Sayid Umar bin Salim al-Attas oleh Umar Mangqus dan fatwa Ahmad Soerkati dalam mempertahankan pernikahan anak wanita seorang sayid dengan laki-laki non sayid, menjadi awal mula dari perselisihan yang memicu perdebatan di kalangan Arab-Hadrami di Hindia-Belanda. Namun, respons yang diberikan oleh Uthman bin Yahya, seorang sayid terkemuka di Batavia, dengan mengeluarkan fatwa bahwa hukum Islam tidak mengharuskan kelompok non sayid untuk mencium tangan sayid, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan dalam masyarakat Arab-Hadrami mengenai tradisi dan praktik sosial yang ada pada masa itu (Ali 2018).

Sebuah pernyataan yang sama juga dikuatkan oleh salah satu narasumber yang berhasil diwawancarai oleh peneliti mengenai pandangan mereka sebagai keturunan Hadrami yang pernah melakukan penelitian di Indonesia terkait perbedaan penggunaan gelar sayid di kalangan Arab-Hadrami di Indonesia dan situasi di Hadramaut, berikut pernyataannya:

“Baik di Hadramaut maupun di Indonesia perihal penggunaan gelar sayid hampir sama saja. Mereka yang dipanggil sayid merupakan orang-orang yang memang memiliki darah (nasab) yang terhubung dengan Rasulullah. Namun bagi kami (orang Hadrami) hal yang paling membedakan antara golongan sayid dan non sayid hanya dalam penguasaannya terhadap ilmu pengetahuan agama, lebih dari itu, bedanya tidak ada di antara kami (Wawancara via zoom dengan Abdul Raef at-Tamimi, 2023).”

Setelah kongres Al-Irsyad di Batavia, terjadi kegemparan di antara komunitas Arab-Hadrami, di mana golongan syekh memprovokasi golongan sayid dengan mencatatkan anggota kelompoknya yang menikah sebagai sayid, menambahkan kata “sayid” pada papan nama di rumahnya, serta memperkenalkan diri sebagai sayid. Hal ini juga didukung oleh narasumber lain yang memberikan pandangannya tentang penggunaan gelar sayid di kalangan masyarakat Arab-Hadrami, berikut pernyataannya:

“Sayid dan non sayid itu hanya perihal nasab saja, mereka menganggap bahwa mereka memiliki darah Nabi atau Rasulullah di dalamnya. Selain itu, memang mereka punya kebiasaan atau tradisi untuk mencatat nama dari setiap keturunannya dan mereka harus hafal, sehingga mereka sampai ke nama kakek-kakeknya yang di atas pun masih hafal. Nah hal ini yang tidak dimiliki oleh kalangan Al Irsyad (non sayid) yang memang tidak punya kebiasaan atau tradisi itu. Sehingga perihal nasab dan sejarahnya terlupakan begitu saja (Wawancara via zoom dengan Nabiel A. Kariem Hayaze, 2023).”

Kompetisi dalam penggunaan gelar “sayid” tidak hanya merusak keharmonisan sosial di

antara komunitas Arab-Hadrami, tetapi juga menyebabkan konsekuensi serius di bidang ekonomi. Karyawan dari kelompok lawan dipecat dan hutang tidak dibayar. Bisnis Arab-Hadrami merosot dan pedagang kehilangan sebagian pelanggan. Sejumlah pengusaha menginvestasikan banyak uang dalam konflik ini sehingga menyebabkan hampir bangkrut. Pada tahun-tahun pertarungan ini, batas-batas baru mulai muncul, seperti antara *Wulaiti* dan *Muwallad*, sayid progresif dan konservatif, dan kaum muda dan tua. Namun, pada akhir 1930-an, generasi *Muwallad* mampu mengurangi polarisasi ini (Jonge 2019).

Orientasi Tentang Tanah Air

Faktor terakhir yang menjadi sebab munculnya polarisasi pada masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta ialah perbedaan pandangan tentang *wattaniyah* (tanah air). Keyakinan ini menyebabkan orang Arab-Hadrami terbagi menjadi dua golongan berdasarkan tempat kelahirannya, yaitu Arab Asli (*Wulaiti*) dan Arab Peranakan (*Muwallad*). Sementara *Wulaiti* memandang Hadramaut sebagai tanah air mereka dan bangga dengan sifat ke-Arab-an (*'urubah*) yang dimilikinya, *Muwallad* merasa Hindia-Belanda sebagai tempat kelahiran dan berjuang untuk mendapatkan hak yang sama dengan *Wulaiti*. Perbedaan pandangan ini menjadi sumber perselisihan di antara kedua golongan dan memicu polarisasi dalam masyarakat Arab-Hadrami, meskipun pada akhirnya generasi Arab-Hadrami peranakan mampu mengurangi polarisasi ini pada akhir tahun 1930-an (Suparman and Yulianto 2016).

Polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda semakin tajam karena perbedaan pandangan tentang tanah air. *Muwallad* menganggap Hindia-Belanda sebagai tanah air mereka, sementara *Wulaiti* memandang Hadramaut sebagai tanah air mereka. Hal ini menjadi pemicu banyaknya konflik di antara keduanya. *Wulaiti* menolak pandangan *Muwallad* karena dianggap tidak sesuai dengan identitas nasional dan asal-usul mereka yang berakar dari Arab asli. Oleh karena itu, persoalan tanah air menjadi topik yang sangat membelah masyarakat Arab-Hadrami di Hindia-Belanda (Mandal 2017).

Kalangan *Wulaiti* menganggap bahwa kesetiaan berdasarkan kebangsaan, tanah air, dan tanah tumpah darah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut mereka, dalam Islam tidak ada konsep kebangsaan atau tanah air, dan sebagai seorang Muslim, kesetiaan harus hanya kepada agama. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa sebagai sesama Muslim, hubungan antara mereka tidak dipengaruhi oleh keturunan, bahasa, atau agama yang berbeda. Semua Muslim dianggap sebagai saudara seiman yang tak terpisahkan. Kalangan *Muwallad* merespons hal ini dengan merilis sebuah seri artikel dalam surat kabar *Aliran Baroe* pada tahun 1939 berjudul "Di Sekeliling Kebangsaan dan Islam". Seri ini berfokus pada perlawanan mereka terhadap pandangan *Wulaiti* tentang tanah air dan kebangsaan dalam Islam, berikut isi surat kabar tersebut:

"Bahasa di dalam Islam! Demikianpoen di tentang, bahasa sebagaimana jang oemoemnja sering didengoengkan: orang Islam haroes dipersatoekan oleh satoe bahasa. Di dalam Islam, memang bahasanja tjoema satoe ialah bahasa Alqoeran atau lebih tegas lagi 'bahasa Arab', bahasa jang selama ini ini dipakai sebagai bahasa agama. Tetapi disamping itoe, boekan haram atau sesat kalau orang Islam di Indonesia tida berbahasa Arab lagi

tetapi berbahasa Indonesia! Tida ada perintah jang menitahkan soepaja segenap kaoem Moeslimin di doenia sama berbahasa Arab belaka! (*Aliran Baroe* 1939a)”

Seri ini juga tidak luput membahas kedudukan tanah air dalam Islam, dan bagaimana seharusnya umat Islam melihat tentang tanah air, berikut isinya:

“Arti tanah air di dalam Islam poen demikian poela. Segenap negri Islam di segala pendjoeroe doenia boleh menjadi tanah air kita dalam artian oemoem, tergaboeng dalam lingkoengan jang besar sebagai ‘al-Wathon al-milie’, yaitu tanah air keagamaan. Tetapi di samping tanah air jang loeas itoe, boekan tiada poela ‘al-wathon asj-sjach shi’, jang kepadanja kita disoeroeh berboeat bakti oentoek mendjaga kemerdekaan dan kemapoeannja. Tanah air atau Alwathon Asj-sjachshi ialah tanah air sendiri di mana kita ada dilahirkan. Memperhatikan tanah air keagamaan jang djaoeh-djaoeh tetapi loepa pada tanah air sendiri jang ada di dekat mata ini satoe pelanggaran terhadap perintah agama jang menitahkan pemeloeknja boeat mendahoeloekan jang dekat daripada jang terdekat (*Aliran Baroe* 1939a).”

Perbedaan pandangan tentang orientasi tanah air ini terus menjadi duri dalam daging. Peneliti menganalisis bahwa kedua kelompok ini punya dasar historisnya masing-masing untuk mempertahankan orientasi mereka tentang tanah air. Hal ini terus terjadi pada generasi-generasi di bawahnya yang masih menggunakan cara pandang ini, sampai nantinya akan dipersatukan oleh kalangan anak muda Arab-Hadrami yang merasa bosan dengan pertikaian ini (Kazim 2022).

Bentuk-Bentuk Polarisasi Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta

Organisasi Sayid dan Non-Sayid di Surakarta

Dalam masyarakat Hindia-Belanda pada masa lalu, terdapat stratifikasi sosial yang membagi masyarakat Arab-Hadrami menjadi dua kelompok besar, yakni sayid dan non sayid. Kedua kelompok ini kemudian membentuk organisasi masing-masing, yaitu Al Irsyad (non sayid) dan Ar Rabitah Alawiyah (sayid). Walaupun pada masa sebelumnya masyarakat Arab-Hadrami tergabung di dalam satu payung organisasi bersama bernama Jamiat Khair. Namun dalam perjalanannya, masyarakat Arab-Hadrami yang berada di Jamiat Khair memiliki visi yang berbeda sehingga menjadikan orang-orang Arab-Hadrami di dalamnya harus mengalami perpecahan (Sarjono 2012).

Kehadiran Al Irsyad menandai polarisasi serius di kalangan masyarakat Arab-Hadrami, tidak terkecuali yang berada di Surakarta. Asal mula polarisasi ini dapat dilacak setelah runtuhnya sistem stratifikasi tradisional Arab-Hadrami di Hindia-Belanda. Status tinggi yang dinikmati oleh para sayid di Hadramaut, telah diruntuhkan oleh kondisi sosial yang berbeda di mana orang-orang Arab-Hadrami kalangan non sayid mampu menemukan dirinya lebih baik di Hindia-Belanda. Sebagai contoh, seorang yang berada dalam status tradisional rendah seperti Umar Mangqus, mampu mengembangkan kekayaannya di Hindia-Belanda dan bahkan mencapai posisi kekuasaan di atas sayid (Miftahuddin 2017).

Lahirnya Rabitah Alawiyah mendapat sambutan yang cukup hangat dari kalangan sayid. Mereka sudah lama mendambakan suatu organisasi yang diharapkan mampu menandingi Al-Irsyad.

Sebenarnya jika melihat kuantitas, jumlah para sayid yang ada di Hindia-Belanda pada masa itu cukup banyak. Jika dipersentasekan, jumlah sayid dan non sayid yang ada di Hindia-Belanda berjumlah 40 berbanding 60. Walaupun secara jumlah kalangan non sayid lebih banyak daripada kalangan sayid, hanya saja penyebaran sayid tidak rata seperti kelompok non sayid di Hindia-Belanda. Namun di beberapa daerah, jumlah kalangan sayid lebih banyak jika dibandingkan non sayid (Kesheh 2007).

Polarisasi yang terjadi di antara kedua kelompok ini kemudian tidak hanya terjadi dalam pemilihan dan perlembagaan organisasi sosial yang ada di Surakarta. Lebih jauh lagi, polarisasi ini juga kemudian merambat ke dalam masalah lainnya seperti pendidikan yang peneliti jelaskan di bawah ini. Kedua kelompok ini, lewat organisasinya masing-masing akan mendirikan beberapa sekolah yang digunakan sebagai media untuk menyebarluaskan paham dan nilai-nilai yang dipahami oleh kelompoknya masing-masing. Kedua kelompok ini mendirikan lembaga pendidikan sebagai cara untuk bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya yang didirikan oleh kelompok pesaingnya.

Lembaga Pendidikan Sayid dan Non Sayid di Surakarta

Pada awal abad ke-20 M, kelompok sayid di Surakarta memainkan peran penting dalam perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Salah satu tokoh utama dari kelompok ini adalah Sayid Abdurrahman Alkadrie, yang mendirikan lembaga pendidikan modern pertama di Surakarta pada tahun 1914. Lembaga pendidikan yang didirikan oleh Sayid Abdurrahman Alkadrie awalnya bernama Sekolah Melayu. Sekolah ini berfokus pada pendidikan dasar dan menengah, serta memasukkan pelajaran agama Islam, bahasa Melayu, dan pelajaran umum seperti matematika dan sains (Husain Haikal 2019). Pada tahun 1924, Sekolah Melayu berganti nama menjadi Sekolah Agama Islam Alkhairaat. Sekolah ini kemudian berkembang menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam terbesar di Surakarta, dengan program pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Selain itu, lembaga pendidikan ini juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya, seperti pertunjukan seni dan kegiatan amal. Pada tahun 1947, Sayid Abdurrahman Alkadrie mendirikan sebuah perguruan tinggi Islam bernama Institut Agama Islam Alkhairaat (IAIA). Perguruan tinggi ini berfokus pada studi agama Islam dan bahasa Arab, serta menawarkan program sarjana dan pasca sarjana. Institut ini kemudian berkembang menjadi salah satu perguruan tinggi Islam terkemuka di Indonesia (Sarjono 2012).

Organisasi Jamiat Khair juga mendirikan beberapa sekolah di Surakarta. Pada tahun 1915, Jamiat Khair mendirikan sebuah sekolah dasar bernama Madrasah Ar-rabitah Alawiyah Solo. Selain itu, organisasi ini juga mendirikan sebuah sekolah menengah pertama bernama Madrasah Tsanawiyah pada tahun 1922. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh kelompok sayid di Surakarta pada periode antara tahun 1914-1950 berfokus pada pendidikan Islam, bahasa Arab, dan pelajaran umum seperti matematika dan sains. Sekolah ini juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Surakarta dan memainkan peran penting dalam pembentukan intelektual dan kebudayaan di kota tersebut (Miftahuddin 2017).

Organisasi Jamiat Khair juga mendirikan beberapa sekolah di Surakarta. Pada tahun 1915, Jamiat Khair mendirikan sebuah sekolah dasar bernama Madrasah Arrabitah Alawiyah Solo.¹⁹³ Selain itu, organisasi ini juga mendirikan sebuah sekolah menengah pertama bernama Madrasah

Tsanawiyah pada tahun 1922. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh kelompok sayid di Surakarta pada periode antara tahun 1914-1950 berfokus pada pendidikan Islam, bahasa Arab, dan pelajaran umum seperti matematika dan sains. Sekolah ini juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Surakarta dan memainkan peran penting dalam pembentukan intelektual dan kebudayaan di kota tersebut (Anshari and Fahrudin 2020).

Pada tahun 1911, beliau berinisiatif untuk mendirikan Al-Jam'iyah Al-'Arabiya Al-Islamiyah yang memfokuskan pada persatuan orang Arab-Hadrami di Surakarta, serta memberikan pendidikan yang berbobot kepada anak-anak mereka. Organisasi ini kemudian mendatangkan lima orang guru dari Timur Tengah untuk mengajar di sekolah yang didirikannya. Usaha dan langkah yang dilakukan Syekh Awad Syahbal dengan mendatangkan guru-guru dari luar negeri tersebut merupakan sebuah keputusan dan langkah yang diambilnya di dalam usaha untuk memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda Arab-Hadrami yang ada di Surakarta (Hayaze 2018).

Surat Kabar Sayid dan Non Sayid di Surakarta

Surat kabar merupakan sebuah wadah aspirasi yang cukup berhasil pada masa itu. Hal ini terbukti dari beberapa surat kabar yang dimiliki oleh kelompok sayid dan non sayid yang ada di Surakarta. Surat kabar *Al-Hadi* adalah salah satu surat kabar yang diterbitkan oleh kelompok sayid di Surakarta pada awal abad ke-20 M. Surat kabar ini mulai terbit pada 7 November 1919 dan berhenti terbit pada tahun 1940. *Al-Hadi* menjadi salah satu media massa yang digunakan oleh kelompok sayid untuk menyampaikan berbagai ide dan pandangan mereka terkait dengan agama, politik, dan kebudayaan. Surat kabar ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran keagamaan dan memperkenalkan kelompok sayid kepada masyarakat (Yudhistira 2016).

Tidak mau ketinggalan, kelompok non sayid juga mendirikan beberapa surat kabar di Surakarta pada abad ke-20 M. Kelompok non sayid atau Al-Irsyad juga aktif dalam mengelola surat kabar di Surakarta pada periode 1914-1950. Surat kabar tersebut adalah surat kabar *Al-Irsyad*, yang pertama kali terbit pada 1 Januari 1914. Dalam surat kabar *Al-Irsyad*, kelompok ini menyuarakan pandangan-pandangan mereka yang mengenai berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, agama, politik, dan sosial (Arifianto 2011).

Surat kabar *Al-Irsyad* memiliki karakter yang berbeda dengan surat kabar yang didirikan oleh kelompok sayid seperti *Al-Falah* dan *Al-Munir*. Surat kabar *Al-Irsyad* lebih terbuka terhadap pengaruh kebudayaan Barat dan memperkenalkan konsep Islam modern. Surat kabar ini juga menjadi media bagi kelompok Al-Irsyad untuk menyebarluaskan ideologi mereka yang lebih inklusif dan nasionalis. Dalam perkembangannya, surat kabar *Al-Irsyad* juga mengalami pasang surut. Pada masa awal-awal terbit, *Al-Irsyad* berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu surat kabar yang cukup populer di Surakarta. Namun, pada masa pendudukan Jepang, surat kabar ini terpaksa mengalami penurunan kualitas karena adanya aturan ketat yang diberlakukan oleh pihak Jepang terhadap media massa. Setelah kemerdekaan Indonesia, surat kabar *Al-Irsyad* tetap terbit meskipun dengan periode yang tidak teratur dan akhirnya dihentikan pada tahun 1950 (Rosidah 2015).

Surat kabar *Al-Ma'arif* awalnya didirikan pada tahun 1912 di Yogyakarta oleh Sayid Abdullah bin Muhammad Al-Qadri. Namun setelah beberapa tahun terbit, surat kabar ini kemudian pindah ke Surakarta pada tahun 1917. Di Surakarta, surat kabar *Al-Ma'arif* menjadi lebih terkenal dan berhasil menjangkau pembaca di seluruh Hindia-Belanda. Dalam sejarahnya, *Al-Ma'arif* dikenal sebagai surat kabar yang mewakili suara kaum non-sayid. Hal ini dapat dilihat dari isi tulisan-tulisannya yang kritis terhadap pemerintah kolonial Belanda dan berpihak pada nasionalisme Indonesia. Surat kabar *Al-Ma'arif* juga menjadi media yang menyuarakan pentingnya pendidikan sebagai modal untuk memajukan bangsa. Di bawah kepemimpinan Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka, surat kabar *Al-Ma'arif* berkembang pesat. Namun pada tahun 1942, surat kabar *Al-Ma'arif* terpaksa menghentikan penerbitannya karena terjadi pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, surat kabar *Al-Ma'arif* kembali terbit dan di bawah kepemimpinan Hamka kembali, surat kabar ini berhasil menjadi salah satu media paling berpengaruh di Indonesia (Ilyas 2017).

Pada awal pendiriannya, surat kabar *Al-Misbah* terbit dengan menggunakan metode cetak manual menggunakan mesin tik tua. Namun pada tahun 1938, surat kabar *Al-Misbah* mulai menggunakan mesin cetak modern yang memungkinkan produksi surat kabar lebih efisien dan cepat. Dalam perkembangannya, surat kabar *Al-Misbah* juga sempat menjadi media yang mendukung gerakan nasionalisme Indonesia, meskipun tetap mempertahankan identitas sebagai surat kabar masyarakat Arab-Hadrami. Surat kabar *Al-Misbah* berhasil bertahan selama lebih dari 50 tahun sebelum akhirnya terpaksa menghentikan terbitannya pada tahun 1980-an karena berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pola baca masyarakat dan perkembangan media cetak yang semakin maju (Afrizal 2018).

Surat kabar lainnya ialah surat kabar *Al-Murshid* yang diterbitkan oleh kelompok non-sayid di Surakarta. Surat kabar ini pertama kali terbit pada tanggal 1 Januari 1933 dan diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Murshid yang didirikan oleh H. Abdul Ghani Rasyid. Surat kabar ini awalnya terbit bulanan, namun kemudian berubah menjadi terbit dua mingguan pada tahun 1937. Surat kabar *Al-Murshid* berfokus pada berita-berita dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Islam dan pendidikan. Selain itu, surat kabar ini juga mengangkat isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Surakarta dan sekitarnya. Surat kabar ini memiliki pengaruh yang cukup besar di kalangan masyarakat Muslim di Surakarta dan sekitarnya (Yudhistira 2016).

Dalam konteks polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta pada masa itu, pendirian surat kabar oleh kelompok sayid dan non sayid dapat dianggap sebagai bentuk polarisasi yang lebih jelas. Pada satu sisi, kelompok sayid memilih untuk mendirikan surat kabar *Al-Irsyad*, *Al-Ma'arif*, *Al-Misbah*, dan *Al-Murshid* sebagai media untuk menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka. Di sisi lain, kelompok non sayid juga mendirikan surat kabar seperti *Al-Hadi*, *Al-Minhaj*, *Al-Falah*, dan *Al-Anwar* sebagai wadah untuk menyuarakan pandangan dan aspirasi mereka. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan sosial antara kedua kelompok yang kemudian termanifestasi dalam bentuk media massa.

Dampak Polarisasi Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta Tahun 1914-1950

Mencari Organisasi Persatuan Masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta

Baswedan dan Bafagieh berasal dari organisasi Al-Irsyad dan Rabitah yang pada masa itu memiliki semangat oposisi terhadap kaum tua mereka. Baswedan sendiri belum menjadi pemuka di organisasi ini. Mereka membentuk persatuan yang melahirkan “Bibliotheek Attahdibijah” dan menerbitkan surat kabar “Zaman Baroe” sebagai wadah untuk menyuarakan gagasan persatuan di kalangan masyarakat Arab-Hadrami yang terpolarisasi. Baswedan kemudian memiliki ide untuk mendirikan Persatuan Arab Indonesia (PAI) dengan mengusung prinsip bahwa kaum peranakan Arab-Hadrami memiliki tanah air di Indonesia (Kesheh 2007).

Ide ini dicetuskan, dikembangkan, dan diperjuangkan oleh Baswedan, yang merupakan sebuah “revolusi pikiran” baginya. Meskipun Baswedan sebelumnya merupakan pemuda yang fanatik pada satu golongan, yaitu Al-Irsyad yang bertentangan dengan Rabitah, ia berjuang untuk merealisasikan cita-citanya ini meskipun harus menanggung segala risiko. Baswedan semakin menyadari konflik yang terus berlangsung antara sayid dan non sayid, yang membuka matanya terhadap kompleksitas masyarakat Arab-Hadrami dan karakteristiknya yang beragam. Dia menyimpulkan bahwa kekacauan mental, konflik, dan gangguan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya disebabkan oleh perbedaan agama, tetapi juga masalah sosial dan tradisional yang ada di Hadramaut (Jonge 2004).

Setelah menyaksikan sendiri konflik antara Al-Irsyad (non sayid) dan Rabitah (sayid) yang merusak, Baswedan bukanlah orang pertama yang mencoba untuk meredakan perselisihan antara kedua kelompok ini. Meskipun usaha ini hanya terbatas pada pencapaian kerukunan, Baswedan berharap dapat memperkuat persatuan di antara peranakan Arab. Dia percaya bahwa dengan terwujudnya persatuan di antara mereka dan cita-cita politik lainnya, ini dapat menjadi senjata yang kuat dalam melawan penjajahan bersama dengan gerakan nasionalis Indonesia lainnya. Langkah awal Baswedan dalam mewujudkan tujuannya adalah mengumpulkan dukungan dari berbagai tokoh Arab-Hadrami untuk berkumpul di Semarang pada tanggal 3-5 Oktober 1934, guna mengadakan Konferensi Peranakan Arab (Suparman and Yulianto 2016).

Dalam kongres itu, diambil keputusan untuk mendirikan organisasi khusus bagi orang Arab-Hadrami Peranakan dan Arab-Hadrami Totok hanya bisa menjadi anggota penyokong tanpa hak suara. Berkat Abdul Rahman Baswedan, organisasi Persatuan Arab Indonesia (PAI) dibentuk dan berhasil menyatukan masyarakat Arab-Hadrami yang sebelumnya terpolarisasi menjadi kelompok-kelompok seperti sayid dan non sayid. PAI juga menjadi tempat bagi aktivis nasionalis Arab-Hadrami untuk berperan aktif dalam gerakan kemerdekaan Indonesia (Batubara and Muhajir 2022).

Pengintegrasian Masyarakat Arab-Hadrami Surakarta Menjadi Indonesia

Dalam perkembangannya pernyataan PAI yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai tanah air mereka tidak sepenuhnya mendapat respons yang baik dari kalangan nasionalis Indonesia. Penerimaan PAI yang lebih luas diperoleh setelah organisasi ini mulai memperoleh kepercayaan dari bangsa Indonesia dengan ikut aktif dalam gerakan nasionalis. Langkah pertama dilakukan pada

Kongres kedua PAI di Surabaya pada tahun 1937 dengan menghadirkan wakil Arab-Hadrami di Voolksraad yaitu Sayid Abdullah Salim al-Attas yang menyatakan bahwa PAI hanya dapat menarik minat bangsa Indonesia melalui kegiatan politik (Kwartanada 2011).

Kongres itu membicarakan program politik yang diusulkan al-Attas, tokoh yang mendekatkan organisasi PAI dengan sayap gerakan nasionalis yang lebih konservatif dengan jalan mencari dukungan para nasionalis Indonesia. Hal ini tercermin di dalam tulisan yang terbit di surat kabar *Insaf*, berikut isinya:

“Persatoean Arab Indonesia (P.A.I) memiliki idealisme yang sama seperti yang dicita-citakan masyarakat Indonesia, merebut kemerdekaan Indonesia. Tetapi PAI, yang mengakui otoritas Belanda pada saat ini, menyetujui usaha masyarakat Indonesia yang bermaksud untuk mendapatkan posisi yang sama dengan Belanda, sebagai warga negara dan masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri dalam satu kesatuan dengan Belanda seperti yang dikemukakan dalam petisi Soetardjo (Hamid 1937).”

Sejak saat itu, PAI berkembang aktif dalam perpolitikan Indonesia. Organisasi itu menyatakan dukungannya terhadap petisi Soetardjo di hadapan Voolksraad pada tahun 1936 yang meminta diadakannya konferensi untuk membicarakan pemberlakuan otonomi bagi Hindia-Belanda dalam waktu sepuluh tahun. Cabang-cabang PAI di berbagai kota merencanakan rapat umum yang mendukung petisi itu yang juga ditandatangani oleh Alatas. Bagi sebagian masyarakat Indonesia, ini menjadi bukti yang cukup kuat bahwa organisasi itu memiliki maksud yang benar-benar baik (Sodikin 2021).

Sejak tahun 1944, para pemuka Arab-Hadrami diundang untuk ikut dalam badan-badan penasihat yang baru dibentuk seperti: *Djawa Hokokai* (Organisasi Kesetiaan Rakyat) dan *Arabujin Shido Linkai* (Komite Panduan Arab) (Alatas 1944). Namun tidak semua pemimpin Arab-Hadrami siap melakukan kerja sama dengan Jepang. Mereka terpecah menjadi dua, satu kelompok yang bersedia bekerja sama dengan Jepang dan kelompok lainnya menolak. Kelompok yang mendukung kerja sama dengan Jepang seperti A.S. Alatas (mantan anggota Voolksraad) bekerja sebagai administrasi di surat kabar Asia Raya. Ia juga kadang-kadang menyumbangkan artikel untuk surat kabar tersebut dan dalam tulisannya menyerukan kepada sesama orang Arab-Hadrami untuk membantu pemerintah Jepang mencapai kemenangannya dalam Perang Asia Raya. Sebaliknya tokoh seperti Hamid Algadrie (salah satu mantan pemimpin PAI) bergabung dengan gerakan anti Jepang yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin dan Sutan Sjahrir. Namun beberapa tokoh pemimpin Arab-Hadrami lainnya siap bekerja sama dengan Jepang namun hanya sampai pada batas tertentu saja. Kelompok ini termasuk di dalamnya ialah A.R. Baswedan (pendiri PAI) yang bersahabat dengan pemimpin kemerdekaan Indonesia yaitu Sukarno. Atas permintaan Sukarno, dia menjadi terlibat di dalam kegiatan *Djawa Hokokai* (Amaruli, Noor, and Sulistiyono 2018).

Pemimpin seperti Baswedan dan Alatas yang dipercaya oleh Jepang dan Sukarno sampai batas tertentu berada di posisi yang lebih nyaman daripada Kapitan Arab yang sebagian besar diangkat pada masa sebelumnya. Hal ini karena kedudukan para Kapitan Arab ini harus menemukan keseimbangan antara harapan pada penguasa Jepang yang baru dan keengganan untuk mengatakannya antagonisme rakyat terhadap harapan itu. Namun terlepas dari ambiguitas tersebut, mereka sering sangat kreatif

dalam membohongi dan menyanjung Jepang secara silih berganti (Suratmin and Kwartanada 2014).

Namun setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, segera menjadi jelas bahwa konfirmasi resmi tentang kesetaraan hak antara orang Arab-Hadrami dan orang Indonesia tidak menjadi prioritas utama, baik dari sisi pemerintahan Republik Indonesia yang baru merdeka, ataupun wilayah yang masih dikuasai oleh Belanda yang bersama Inggris mengalahkan Jepang. Meskipun demikian, dua pemerintah yang bersaing itu mengulurkan prospek pengakuan kesetaraan antara orang Indonesia dan kelompok orang Timur Asing lainnya, termasuk orang Arab-Hadrami. prospek tersebut tidak mencegah orang Arab-Hadrami dari mengabdikan untuk tanah air baru mereka, yaitu Indonesia (Yamaguchi 2016).

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam artikel ini dapat ditarik tiga poin kesimpulan terkait dengan polarisasi masyarakat, yaitu: (1) Arab-Hadrami di Surakarta tahun 1914-1950, Faktor utama yang menyebabkan polarisasi di antara mereka adalah adanya perbedaan pandangan tentang gelar dan tradisi, orientasi terhadap tanah air, dan juga Fatwa Solo; (2) bentuk-bentuk polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta antara tahun 1914-1950 terbentuk melalui tiga hal yaitu organisasi sosial, pendidikan, dan surat kabar; (3) dampak polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta antara tahun 1914-1950, tampak bahwa mereka berhasil mengatasi perpecahan dan melanjutkan perjuangan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Meskipun pada masa sekarang, orang Arab-Hadrami di Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, namun mereka masih mempertahankan identitasnya masing-masing.

Dalam meresapi dinamika polarisasi masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta pada periode 1914-1950, terdapat sejumlah potensi riset yang dapat dikembangkan untuk mendalami lebih lanjut sejarah dan perkembangan komunitas ini. Sebagai contoh, studi mendalam dapat dilakukan terkait dengan peran dan pengaruh Kapitan atau Letnan Arab dalam membentuk identitas dan struktur sosial masyarakat Arab-Hadrami. Penelitian juga dapat difokuskan pada aspek sosial-ekonomi masyarakat Arab-Hadrami selama periode tersebut, dengan memerinci dampak polarisasi terhadap kehidupan sehari-hari, mobilitas sosial, dan pola-pola kerja sama ekonomi di antara anggota komunitas. Selain itu, analisis lebih lanjut terkait dengan hubungan antara masyarakat Arab-Hadrami dan pemerintah kolonial Hindia-Belanda dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika kebijakan serta respons masyarakat terhadapnya. Potensi riset lainnya dapat melibatkan pendekatan lintas disiplin, seperti antropologi dan sosiologi, untuk memahami peran agama dan budaya dalam membentuk identitas dan pola interaksi masyarakat Arab-Hadrami. Dengan menggali lebih dalam aspek-aspek tersebut, riset-riset mendatang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang sejarah dan peran masyarakat Arab-Hadrami di Surakarta.



BIBLIOGRAFI

- Abdurrahman, Dudung. 2019. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Afrizal, M. 2018. *Mengenal Sejarah Dan Perkembangan Pers Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Al-Bashir. 1915. "Nahnu Hadramiyun Qabla Kulli Shay," April 15, 1915.
- Alatas, A. S. 1944. "Bangsa Arab Dalam Djawa Hokokai." *Asia Raya*, February 14, 1944.
- Ali, M. S. 2018. "Peran Sayyid 'Utsman Bin Yahya Dalam Perkembangan Pendidikan Islam Di Surakarta Tahun 1930-An." *Jurnal AL-Tahrir* 18, no. 1: 49–62.
- Aliran Baroe. 1939a. "Sekeliling Kebangsaan Dan Islam: Apakah Islam Meleboer Bangsa," 1939.
- . 1939b. "Ratjikan Sla Dari Solo: Aidul-Fitri Di Solo 'Hadhramaut' Di Indonesia," November 1939.
- Amaruli, Rabith Jihan, Maulany. Nazala Noor, and Singgih Tri Sulistiyono. 2018. "Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadhrami Di Indonesia." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 3, no. 2: 122.
- Anshari, Zainal, and Ahmad Hanif Fahrudin. 2020. "Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah Dan Kiprahnya Dalam Pengembangan Pendidikan Islam." *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam* 14, no. 1.
- Arifianto, Romzi. 2011. "The Role of the Arabic Press in the Indonesia National Movement: The Case of Al-Irsyad." *Journal of Indonesian Islam* 5, no. 2: 377–99.
- Bafagieh, Husein. 1938. "Masjarakat Arab Kemandjiran Perawan." *Aliran Baroe*, 1938.
- Batarfie, Abdullah Abubakar. 2021. "Fatwa Solo Dan Lahirnya Al-Irsyad Al-Islamiyyah Di Batavia 1914." Hidayatullah. 2021.
- Batubara, Taslim, and Ahmad Muhajir. 2022. "Persatoean Arab Indonesia (PAI)." *Andalas International Journal of Socio-Humanities* 4, no. 2 (December): 69–79. <https://doi.org/10.25077/aijosh.v4i2.39>.
- Bazher, Najmi Muhammad. 2020. "Dinamika Terbentuknya Wilayah Kampung Arab Di Surakarta." *ARSITEKTURA* 18, no. 2: 249–64.
- Berg, LWC van den. 2010. *Orang Arab Di Nusantara*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Dewi, Irma Ayu Kartika. 2016. "Habib Anis Bin Alwi Al-Habsy Dan Masyarakat Islam Di Surakarta Tahun 1953-2006." Universitas Gajah Mada.
- Fatihah. 2016. *Sejarah Komunitas Arab Di Yogyakarta Pada Abad XX*. Yogyakarta: Penerbit Magnum.
- Freitag, Ulrike. 2003. *Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadhramaut: Reforming The Homeland*. Edited by Reinhard Schulze. Brill.
- Haikal, Husain. 2019. *Indonesia-Arab: Dalam Pergerakan Kemerdekaan*. Yogyakarta: Forum.
- Hamid, Algadri. 1937. "Soe'al Tanah Air Dari Djoeroesan Staasrecht." *Insaf*, 1937.

- Hayaze, Nabil A. 2021. *Hikayat Kapitein Arab Di Nusantara: Jejak Dakwah Dan Nasionalisme*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Hayaze, Nabil A. 2018. *Syekh Awad Syahbal: Perintis Pendidikan Modern & Pejuang Kemerdekaan*. Jakarta Selatan: Yayasan Menara Center.
- Hidayatullah, Akmal Aji. 2021. "Peran Orang-Orang Arab Dalam Gerakan Islam Modern Di Solo, 1912-1942." Universitas Negeri Malang.
- Ilyas, Muhammad. 2017. *Perkembangan Media Massa Arab Di Indonesia*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jacobsen, Frode F. 2009. *Hadhrami Arabs in Present-Day Indonesia an Indonesia-Oriented Group with an Arab Signature*. First edit. Routledge.
- Jonge, Huub de. 2004. "Abdul Rahman Baswedan and The Emancipation of the Hadhrami in Indonesia." *Asian Journal of Social Science* 32, no. 1: 382.
- . 2007. *Sebuah Minoritas Terbelah: Orang Arab Batavia*. Edited by Kees Grijns and Peter J. M. Nas. Jakarta: KITLV-Jakarta.
- . 2019. *Mencari Identitas: Orang Arab Hadrami Di Indonesia (1900-1950)*. Edited by Husein Haikal. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kazim, Musa. 2022. *Identitas Arab Itu Ilusi*. Bandung: Mizan.
- Kesheh, Natalie Mobini. 2007. *Hadhrami Awakening: Kebangkitan Hadhrami Di Indonesia*. Edited by Husein Haikal. Jakarta: Akbar.
- Kwartanada, Didi. 2011. "Dari 'Timur Asing' Ke 'Orang Indonesia': Pemuda Tionghoa Dan Arab Dalam Pergerakan Nasional (1900-1942)." *Jurnal Prisma* 30, no. 2.
- Mandal, Sumit K. 2017. *Becoming Arab: Creole Histories and Modern Identity in the Malay World*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108164931>.
- Miftahuddin. 2017. "Dinamika Komunitas Diaspora Hadhrami Dalam Gerakan Al-Irsyad Di Indonesia, 1945-2007." Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Muzakki, Ahmad, and Himami Hafshawati. 2021. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy'Syari'ah* 7, no. 1: 19–38.
- Noer, Deliar. 1990. *Gerakan Modern Islam Di Indonesia, 1900-1942*. Medan: LP3ES.
- Rosidah, U. 2015. "Kontribusi Pers Islam Terhadap Perjuangan Nasional: Studi Kasus Surat Kabar Al-Fatah Dan Al-Falah Di Surakarta 1925-1942." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 1, no. 1: 1–22.
- Sarjono, A. 2012. "Peranan Dan Kontribusi Organisasi Jam'iyyat Khair Dalam Pembangunan Pendidikan Islam Di Solo." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1: 51–64.
- Sodikin, Ahmad. 2021. "Transformasi Komunitas Arab Indonesia Dari Persatuan Arab Indonesia (PAI) Ke Partai Arab Indonesia 1934-1949." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Suparman, M., and B. Yulianto. 2016. "Integrasi Sosial Masyarakat Arab Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Kewarganegaraan* 7, no. 1: 69–76.

- Suratmin, and Didi Kwartanada. 2014. *Biografi A.R. Baswedan: Membangun Bangsa, Merajut Keindonesiaan*. Jakarta: Kompas.
- Wibowo, Arif Sakti. 2007. "Peranan Keturunan Arab Dalam Jaringan Perdagangan Batik Di Surakarta Abad XX." Universitas Negeri Surakarta.
- Wibowo, Early Setyo. 2020. "Kampung Kurma Kampung Sholawat: Dinamika Perdagangan Di Pasar Kliwon Surakarta Tahun 2002-20013." Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Yamaguchi, Motoki. 2016. "Islamic School and Arab Association: Ahmad Sūrkatī's Reformist Thought and Its Influence on the Educational Activities of Al-Irshād." *Studia Islamika* 23, no. 3 (December). <https://doi.org/10.15408/sdi.v23i3.3268>.
- Yudhistira, B. 2016. "Media Kelompok Minoritas: Surat Kabar Al-Hadi Dan Gema Islam Sebagai Wacana Islam Nusantara." *Jurnal Studi Islam* 11, no. 1: 103–26.



JURNAL SOSIOLOGI AGAMA

Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial

Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

